

# **LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL**



**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh Tahun 2022" dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya good governance dan clean government. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Badan Kesbangpol telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas. Laporan Monitoring Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 berisikan program dan kegiatan Badan kesbangpol tahun 2022 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Badan Kesbangpol selama kurun waktu tahun 2022.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Banda Aceh

**HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19800104 199810 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Bab I   Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perjanjian Kinerja .....	2
Bab II   Data dan Analisis Capaian Kinerja .....	3
2.1. Capaian Kinerja .....	3
2.2. Realisasi Anggaran .....	8
2.3. Evaluasi Capaian Kinerja .....	10
Bab III  Penutup .....	11



## BAB I PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2017-2022 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

## **II. PERJANJIAN KINERJA**

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk tahun 2022 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun secara berjenjang mengacu pada konsep Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II. Sasaran Kegiatan Badan Kesbangpol kota Banda Aceh merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan.



**BAB II**  
**DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

**2.1. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran Kegiatan Badan Kesbangpol. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dapat tercapai. Berikut adalah pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Badan Kesbangpol Tahun 2022:

***Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022***

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembauran Kebangsaan	Menurunnya Ancaman Potensi Konflik Sosial Masyarakat	55 Kasus	5 Kasus
2	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	92%	90%
3	Generasi Muda Bebas Narkoba	Menurunnya Jumlah Penyalahgunaan Narkoba	100 Kasus	0

Pada Tahun Anggaran 2022 banyak kegiatan pada Badan Kesbangpol yang tidak dapat dilaksanakan hal ini disebabkan tidak keluarnya SPD.

**Tabel Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI AKHIR
				I	II	III	IV	
1	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase meningkatnya kesadaran berbangsa, bermegara dan cinta tanah air</b>	85%	0	0	0	0	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85%	0	0	0	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	0	0	0	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	0	0	0	0	
2	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	90%	0	0	0	33.33	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	90%	0	0	0	33.33	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	100 Orang	0	0	0	100 orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	9 Parpol	0	4 Parpol	0	4 Parpol	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	10 Parpol		4 Parpol	0	5 Parpol	



Adapun Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya

1. Sosialisasi Pendidikan Politik



2. Talk Show Pendidikan Politik melalui Media Elektronik



3. Publikasi Pendidikan Politik Melalui Media Cetak

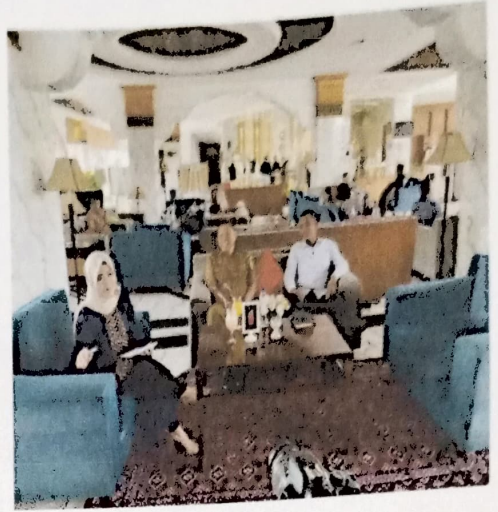




NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI AKHIR
				I	II	III	IV	
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tersebarnya data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	0	0	0	0	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85%	0	0	0	0	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 Orang	0	0	0	0	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	0	0	22.22%	0	
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	0	0	22.22%	0	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1 Kali	0	0	0	0	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan Narkotika, dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	6 Laporan	0	0	2	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	0	0	0	0	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100%	0	50%	0	50%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	0	50%	0	50%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	2 Dokumen	0	1	0	1	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	0	1	0	1	



4. Sosialisasi Narkoba Melalui Media Elektronik





## 2.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Badan Kesbangpol pada Pagu Awal sebesar Rp. 9.503.803.014,- dengan rician Belanja Operasi sebesar Rp.9.485.948.347,- dan belanja Modal sebesar Rp.17.854.667,- setelah perubahan Anggaran berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kota Banda Aceh Nomor 70/R.001/ITKOT-LHR/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Laporan hasil Reviu atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2021 yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Penambahan Anggaran Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Daha bagi hasil Cukai hasil Tembakau Kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022 maka Anggaran Badan Kesbangpol ditetapkan sebesar Rp.11.122.175.214,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.11.008.375.214,- dan belanja Modal sebesar Rp.113.80.000,-. Sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.9.355.948.043,- atau 84.12 % dari alokasi anggaran belanja Badan Kesbangpol.

Dengan rincian untuk setiap program adalah :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11,122,175,214</b>	<b>9,355,948,043</b>	<b>1,766,227,171</b>	<b>84.12</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,996,479,260	3,630,201,672	366,277,588	90.83
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	3,996,479,260	3,630,201,672	366,277,588	90.83
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,177,139	9,303,378	2,873,761	76.40
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,524,463,470	3,314,745,564	209,717,906	94.05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322,947,626	196,079,145	126,868,481	60.72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,889,041	78,076,936	23,812,105	76.63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,001,984	31,996,649	3,005,335	91.41

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	643,409,577	273,715,625	369,693,952	59.63
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	643,409,577	273,715,625	369,693,952	59.63
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	34,366,980	-	34,366,980	- .00
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	459,042,597	273,715,625	185,326,972	59.63
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150,000,000	-	150,000,000	- .00
6	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,485,623,325	1,262,016,400	223,606,925	97.01
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1,485,623,325	1,262,016,400	223,606,925	97.01
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	1,415,077,925	1,256,206,000	158,871,925	88.77
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70,545,400	5,810,400	64,735,000	8.24

### 2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Dengan memperhatikan baik capaian kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2022 masih sangat rendah jauh dari target. Dalam pencapaian kinerja tidak dapat tercapai disebabkan tidak dikeluarkannya SPD sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan diprogramkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.



### BAB III

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 berdasarkan target capaian pada Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan masih terbilang rendah disebabkan tidak dikeluarkannya SPD.
2. Meskipun beberapa dari sub kegiatan sudah terlaksana, namun realisasi anggaran Badan Kesbangpol tahun 2022 juga masih sangat minim, hanya sebesar 84.12%.
3. Koordinasi dengan para stakeholder sudah berjalan seperti yang diharapkan dalam mengoptimalkan capaian kinerja.

#### HASIL MONEV

1. Berkurangnya Potensi Konflik Sosial Di Masyarakat
2. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
3. Tersalurkannya bantuan keuangan bagi Partai Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Banda Aceh

**HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19800104 199810 1 001